

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Memasuki tahun 1980, reformasi sektor publik dilakukan di negara-negara industri maju menanggapi berbagai kritik yang ada. Berbagai perubahan dilakukan, misalnya dengan mengadopsi pendekatan *New Public Management* (NPM) dan *reinventing government* di banyak negara, khususnya negara Anglo-Saxon. NPM berakar pada teori manajemen yang pada dasarnya mengasumsikan bahwa praktik bisnis komersial dan manajemen sektor swasta lebih baik daripada praktik dan manajemen di sektor publik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja sektor publik, perlu mengadopsi sejumlah praktik dan teknik manajemen yang diterapkan swasta kepada sektor publik, seperti adopsi mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaan publik (Mardiasmo, 2009).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan terstruktur dari posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor. Hal tersebut dipertegas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 ayat 9. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelapor yang berguna bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya. Laporan keuangan pemerintah pada hakikatnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas

pengelolaan dana masyarakat, baik dari pajak, pengeluaran kembali atau transaksi lainnya (Adhi dan Suhardjo, 2013).

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja daerah APBD (Rasdianto, E, 2013). Sistem akuntansi pemerintahan di tingkat daerah diatur dengan peraturan Gubernur / Bupati / Walikota mengacu pada peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kemudian sistem akuntansi pemerintahan di pemerintahan daerah diatur dengan peraturan pemerintah no. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta didukung pula oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Pasal 232 yang mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah.

Akuntansi keuangan daerah berperan penting dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana kita ketahui akuntansi keuangan daerah berfungsi untuk menghasilkan keluaran berupa laporan keuangan yang akan menjadi dasar penelitian tentang kinerja pemerintah daerah (*stakeholders* pemerintah daerah). Dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja merupakan entitas pembukuan yang wajib mencatat transaksi yang terjadi di dalam satuan kerja tersebut. Aktivitas akuntansi dalam suatu unit kerja meliputi pencatatan pendapatan, pengeluaran, aset dan selain kas. Prosesnya dilakukan oleh Pejabat Administrasi Keuangan (PPK) berdasarkan dokumen sumber yang disampaikan oleh bendahara (Nordiawan, D, Hertianti, A, 2010).

Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, seperti halnya dengan entitas pemerintah, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas, dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten di bidang akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan tata kelola organisasi (Roviyantie, 2011).

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2015 tanggal 20 Oktober 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Teknis Daerah Kota Palembang. Berdasarkan Peraturan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang mempunyai kedudukan tugas dan fungsi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang adalah SKPD yang merupakan unsur penunjang tugas Walikota di bidang keuangan daerah dan aset, Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Kota Palembang, dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Palembang.

Menurut Kawedar (2009) bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah maka diperlukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan dilakukannya audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat diharapkan bisa meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah pusat ataupun daerah.

**Tabel 1.1**  
**Hasil Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota**  
**Palembang**

| <b>No</b> | <b>Keterangan</b> | <b>Opini</b>                   |
|-----------|-------------------|--------------------------------|
| 1         | Tahun 2013        | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| 2         | Tahun 2014        | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| 3         | Tahun 2015        | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| 4         | Tahun 2016        | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| 5         | Tahun 2017        | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |

Sumber : Data yang diolah dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI, 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Palembang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara konsisten yakni sejak tahun 2013-2017. Opini WTP yang diperoleh Kota Palembang selama 5 (lima) tahun berturut-turut dari BPK RI menjadi fenomena yang sangat menarik perhatian penulis untuk meneliti faktor apakah yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Palembang tahun 2017, faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut karena adanya peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo (Botutihe, 2013). Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2014) yang menunjukkan pemahaman sistem akuntansi mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jembrana. Penelitian Erna (2013) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Administrasi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang penyelenggara pemerintahan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang disebutkan di atas selain terletak pada letak objek yang diteliti, pada waktu dan tempat yang berbeda. Berdasarkan teori uraian di atas dan didukung oleh fakta-fakta yang ada, maka penulis ingin mengkaji lebih jauh dan mendalam tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan dari pemerintah daerah Kota Palembang.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis mengidentifikasi masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan Pemerintah Daerah Kota Palembang.

### **1.3. Ruang Lingkup Pembahasan**

Sehubungan dengan pembahasan yang akan dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dari permasalahannya maka ruang lingkup pembahasan hanya pada Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Pemerintah Daerah Kota Palembang.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Palembang.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan mengenai pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang.

b) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini menjadi bahan informasi serta masukan bagi pemerintah kota Palembang dalam rangka menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) guna meningkatkan kualitas laporan keuangan.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi literatur bagi penelitian selanjutnya sepanjang masih dalam lingkup variabel yang sama.